



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 303 TAHUN 2023**

**TENTANG  
SATUAN TUGAS/RELAWAN  
ANTI NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG SATUAN TUGAS/RELAWAN ANTI NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. sebagai penyuluh, menyebarluaskan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
  2. sebagai inisiator, menginisiasi atau memprakarsai tentang program dan kegiatan P4GN;
  3. sebagai fasilitator, memberikan bantuan dalam memperlancar program P4GN; dan
  4. sebagai penghubung antar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2023  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG SATUAN TUGAS/RELAWAN ANTI  
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 303 TAHUN 2023

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2023

SATUAN TUGAS/RELAWAN  
ANTI NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

| No | Kedudukan dalam Tim |   | Nama                     | Jabatan/Unit Organisasi                               |
|----|---------------------|---|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. | Pengarah            | : | Hendrar Prihadi          | Kepala LKPP                                           |
| 2. | Ketua Tim           | : | Sarah Sadiqa             | Plt. Sekretaris Utama                                 |
| 3. | Wakil Ketua Tim     | : | 1. Iwan Herniwan         | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan                  |
|    |                     |   | 2. Suharti               | Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia |
| 4. | Koordinator         | : | 1. Edi Kristiyanto       | Biro Perencanaan dan Keuangan                         |
|    |                     |   | 2. Ria Agustina Nasution | Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia        |
| 5. | Wakil Koordinator   | : | Resa Anggriani           | Biro Perencanaan dan Keuangan                         |

| <b>No</b> | <b>Kedudukan dalam Tim</b> |   | <b>Nama</b>            | <b>Jabatan/Unit Organisasi</b>                                          |
|-----------|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 6.        | Sekretaris                 | : | Milania Pradani        | Biro Perencanaan dan Keuangan                                           |
| 7.        | Anggota                    | : | 1. Budi Setyo Nugroho  | Biro Perencanaan dan Keuangan                                           |
|           |                            |   | 2. Meisiska            | Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia                         |
|           |                            |   | 3. Hamzah Abdul Majid  | Biro Hubungan Masyarakat dan Umum                                       |
|           |                            |   | 4. Fenita Enggraini    | Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum                     |
|           |                            |   | 5. Lingga Sakti        | Direktorat Pengembangan dan Kebijakan Pengembangan Khusus               |
|           |                            |   | 6. Nanda Faridah       | Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional         |
|           |                            |   | 7. Astri Widya Sartika | Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan |
|           |                            |   | 8. Niken Mustikarini   | Direktorat Sistem Pengadaan Digital                                     |

| No | Kedudukan dalam Tim | Nama                                     | Jabatan/Unit Organisasi                         |
|----|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    |                     | 9. Moses Alfredo Samodara                | Direktorat Pasar Digital Pengadaan              |
|    |                     | 10. Fika Dautar Adika Putra              | Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan |
|    |                     | 11. I Nyoman Aditya Wicaksana            | Direktorat Sertifikasi Profesi                  |
|    |                     | 12. Andi Putri Fathania Nur Ranti Faisal | Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat            |
|    |                     | 13. Fairuz Nawfal Hamid                  | Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah           |
|    |                     | 14. Moch. Ilham Riswanda                 | Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum        |
|    |                     | 15. Winny Adlina Pratomo                 | Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa       |
|    |                     | 16. Rahmah Febrina                       | Inspektorat                                     |
|    |                     | 17. Rinatri Rahmayanti                   | Pusat Data dan Informasi                        |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI